



KRAKATAU STEEL



Bahan Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

Jakarta, 29 Juli 2020

Agenda Kesatu (1)

AGENDA

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 dan penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 dan Tahun Buku 2017 termasuk Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.

DASAR HUKUM

Pasal 21 ayat (2) huruf a serta ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.



Agenda Kedua (2)

AGENDA

Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.

DASAR HUKUM

Pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/04/2020.



Agenda Ketiga (3)

AGENDA

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020.

DASAR HUKUM

Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan.



Agenda Keempat (4)

AGENDA

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020.

DASAR HUKUM

1. Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("POJK No. 13/2017")



Agenda Kelima (5)

AGENDA

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Kesatu (HMETD Kesatu).

DASAR HUKUM

1. Ketentuan Lampiran Bab III, Huruf (A) dan Huruf (B) Angka 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/06/2015 Tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/09/2015
2. Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015")



Agenda Keenam (6)

AGENDA

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) ("PP No. 24 Tahun 2018").



Agenda Ketujuh (7)

AGENDA

Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Krakatau Steel

DASAR HUKUM

1. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja
2. Pasal 41 Peraturan Dana Pensiun Krakatau Steel



Agenda Kedelapan (8)

AGENDA

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara ("PER-02/MBU/2010") berikut seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-22/MBU/12/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PER-02/MBU/2010.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara ("PER-01/MBU/2011") berikut seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas PER-01/MBU/2011.
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggora Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara ("PER-03/MBU/2012").
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara ("PER-12/MBU/2012").
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/2012 Tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan Dan/Atau Kecurangan ("PER-19/MBU/2012").
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-21/MBU/2012 Tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara ("PER-21/MBU/2012").
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara ("PER-04/MBU/2014") berikut seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-01/MBU/05/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas PER-04/MBU/2014.
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ("PER-08/MBU/12/2019").



Agenda Kedelapan (8)

DASAR HUKUM

Pengukuhan seluruh peraturan tersebut dalam RUPS sesuai dengan ketentuan:

1. Pasal 34 ayat (1) PER-02/MBU/2010.
2. Pasal 45 ayat (1) PER-01/MBU/2011.
3. Pasal 22 PER-03/MBU/2012.
4. Pasal 32 ayat (2) PER-12/MBU/2012.
5. Pasal 4 ayat (3) PER-19/MBU/2012.
6. Pasal 2 ayat (3) PER-21/MBU/2012.
7. Pasal 5 ayat (1) PER-04/MBU/2014.
8. Pasal 16 PER-08/MBU/12/2019.



Agenda Kesembilan (9)

AGENDA

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

DASAR HUKUM

Surat nomor S-455/MBU/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Penyampaian Usulan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Krakatau Steel (Persero), Tbk

